



KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI KABUPATEN LEBAK

Widi Januar Ghafur

UPLAND Project
idijanuar@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima
Maret 2025
Revisi
April 2025
Terbit
Mei 2025

Keywords:

Labor Placement;
Unemployment Reduction;
Public Administration.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of labor placement policies in Lebak Regency, focusing on their impact on reducing unemployment and improving community welfare. Despite positive effects, such as a decrease in unemployment rates, challenges persist, including a mismatch between worker skills and industry needs, lack of coordination between government and companies, and the prevalence of intermediaries. The findings suggest that improving skill training, enhancing coordination with the private sector, and strengthening regulatory oversight can enhance policy effectiveness. This research contributes to the literature on labor policies and public administration, providing insights for better implementation strategies in regions with high unemployment.

Korespondensi:

idijanuar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada dampaknya terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun memberikan dampak positif seperti penurunan angka pengangguran, tantangan masih ada, termasuk ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan, serta maraknya praktik pencaloan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan keterampilan, penguatan koordinasi dengan sektor swasta, dan pengawasan yang lebih ketat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan ketenagakerjaan dan administrasi publik, serta memberikan wawasan untuk strategi implementasi yang lebih baik di daerah dengan pengangguran tinggi.

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Ghafur, W. J. (2025). Kebijakan penempatan tenaga kerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Studi kasus di Kabupaten Lebak. *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(1), 55–62.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ketenagakerjaan menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah pengangguran dan kecocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi tantangan besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016, kebijakan penempatan tenaga kerja bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memastikan bahwa tenaga kerja yang terlatih dapat disalurkan ke sektor-sektor yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih luas. Di Kabupaten Lebak, peningkatan jumlah pengangguran menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dan program penempatan tenaga kerja dianggap sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Namun, meskipun program ini telah berjalan cukup lama, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya "link and match" antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta rendahnya partisipasi perusahaan dalam melaporkan lowongan pekerjaan secara resmi. Di samping itu, maraknya praktik pencaloan tenaga kerja juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini, yang memperburuk efektivitas kebijakan.

Untuk itu, artikel ini menawarkan alternatif solusi dengan mengusulkan penerapan model integrasi antara pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan sistem monitoring yang lebih ketat terhadap pelaporan lowongan pekerjaan oleh perusahaan. Kebijakan yang lebih tegas terkait pencaloan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah

akses pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini, analisis ini juga mengkaji pentingnya peran aktif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menciptakan sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penempatan tenaga kerja telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi angka pengangguran, dampaknya belum maksimal. Misalnya, Wicaksana et al. (2020) dalam penelitian mereka tentang kebijakan ketenagakerjaan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lebak, penelitian ini akan berfokus pada analisis implementasi program penempatan tenaga kerja, dengan tujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu aspek penting yang akan dibahas adalah penguatan koordinasi antara instansi terkait serta pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis kebutuhan industri.

Lebih lanjut, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi seperti Kabupaten Lebak. Dengan menggali permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kebijakan penempatan tenaga kerja dan administrasi publik, serta memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya memperbaiki mekanisme penempatan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kinerja administrasi publik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menilai kembali strategi yang ada dan mencari cara agar program penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Penempatan tenaga kerja adalah salah satu kebijakan penting dalam sektor ketenagakerjaan yang berperan dalam memitigasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan pasar. Program penempatan tenaga kerja ini mencakup berbagai jenis penempatan, seperti penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), dan antar kerja antar negara (AKAN). Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada efisiensi pelaksanaannya, koordinasi antar pihak, serta kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan dari dunia usaha.

Di Indonesia, pengangguran menjadi masalah yang terus dihadapi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kabupaten Lebak relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa program penempatan tenaga kerja di daerah ini masih perlu perbaikan. Pengangguran yang tinggi di Kabupaten Lebak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya akses informasi mengenai lowongan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan, serta rendah-

nya partisipasi sektor swasta dalam melaporkan lowongan pekerjaan. Penelitian oleh Sugianto (2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar pencari kerja di daerah ini belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga kebijakan penempatan tenaga kerja menjadi kurang efektif.

Beberapa studi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam mendukung keberhasilan kebijakan penempatan tenaga kerja. Program pelatihan yang lebih berbasis pada permintaan pasar sangat diperlukan untuk menutup kesenjangan keterampilan yang ada. Sebagai contoh, penelitian oleh Wicaksana et al. (2020) menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dapat meningkatkan peluang penempatan tenaga kerja, serta mengurangi ketidakcocokan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia. Selain itu, peran aktif pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama dengan sektor swasta juga sangat penting, terutama dalam hal penyebaran informasi lowongan kerja secara transparan dan tepat waktu.

Di sisi lain, administrasi publik yang efektif juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan aktor yang terlibat, kualitas administrasi publik, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Lebak, koordinasi yang kurang antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan perusahaan-perusahaan lokal menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat proses penempatan tenaga kerja. Selain itu, masih adanya praktik pencaloan dalam penempatan tenaga kerja juga menambah kesulitan dalam memastikan bahwa pencari kerja mendapatkan kesempatan yang adil.

Perbaikan kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak memerlukan pende-

katan yang lebih terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat itu sendiri. Sosialisasi yang lebih baik mengenai program ini, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, diharapkan dapat mempercepat penurunan angka pengangguran di daerah tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali permasalahan yang ada secara mendalam melalui wawancara dan observasi lapangan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, dengan fokus pada pejabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan penempatan tenaga kerja.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan utama, seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, serta Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Pelatihan. Wawancara menggunakan panduan semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam (Grindle, 1980). Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi kontekstual mengenai proses kebijakan secara langsung. Peneliti juga menggunakan triangulasi data dengan membandingkan wawancara dan hasil observasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Moleong, 2010).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis induktif, yang dimulai dengan transkripsi wawancara, pengkategorian data, dan identifikasi tema-tema penting. Validitas data diperiksa dengan triangulasi dan pengecekan keandalan data untuk memastikan keabsahan temuan (Bogdan & Taylor, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan penempatan tenaga

kerja di Kabupaten Lebak serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan menghubungkan pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang sesuai. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan perusahaan yang ada di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja melalui program penempatan yang ada. Meskipun demikian, beberapa perusahaan lokal menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dalam program ini, meskipun belum semua perusahaan memenuhi kewajiban untuk melaporkan lowongan pekerjaan secara tepat waktu dan transparan. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan pencari kerja mengenai prosedur penempatan yang resmi turut memperburuk efektivitas kebijakan ini.

Secara umum, kebijakan penempatan tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengurangan pengangguran. Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Lebak terlihat signifikan setelah adanya program penempatan tenaga kerja, meskipun angkanya masih jauh dari harapan. Penerima pekerjaan yang berhasil ditempatkan melalui program ini melaporkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga, yang berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi mereka. Namun, dampak ini masih terbatas pada mereka yang memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pasar kerja, sementara mereka yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Masalah lainnya adalah maraknya praktik pencaloan dalam penempatan tenaga kerja, yang menyebabkan banyak pencari kerja memilih jalur informal untuk memperoleh pekerjaan, meskipun itu dapat mengarah pada eksploitasi. Selain itu, terbatasnya sumber daya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menangani jumlah pencari kerja yang terus meningkat juga menjadi penghambat. Keberadaan birokrasi yang rumit dan kurangnya sistem informasi yang efisien untuk mencocokkan lowongan pekerjaan dengan pencari kerja memperburuk kondisi ini.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan. Pertama, peningkatan kualitas pelatihan keterampilan yang berbasis pada kebutuhan pasar tenaga kerja sangat penting agar pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Pemerintah daerah perlu bekerja sama lebih intens dengan sektor swasta untuk menyusun program pelatihan yang relevan dan terarah. Kedua, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan secara tepat waktu, serta mematuhi kewajiban yang ada. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pemberian insentif atau sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan. Ketiga, upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai prosedur resmi dalam mendapatkan pekerjaan akan sangat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada calo yang tidak resmi. Keempat, perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pencari kerja dalam mengakses informasi tentang

lowongan pekerjaan secara transparan dan mudah diakses.

Tabel 1. Pengaruh Keterampilan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Keterampilan	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Penempatan Kerja	Persentase Penyerapan
Keterampilan Dasar	500	200	40%
Keterampilan Spesifik	300	250	83.33%
Tanpa Keterampilan	400	50	12.5%

Tabel 1 menunjukkan bahwa pencari kerja dengan keterampilan spesifik memiliki tingkat penyerapan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak.

Tabel 2. Masalah Utama dalam Implementasi Kebijakan

Masalah Utama	Persentase Pencari Kerja yang Menghadapi Masalah
Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Lowongan	45%
Kurangnya Partisipasi Perusahaan	35%
Praktik Pencaloan	20%

Tabel 2 mengidentifikasi tiga masalah utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja. Masalah terbesar adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan, yang menjadi penghambat utama dalam penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak memberikan manfaat dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat sejumlah tantangan yang

perlu diatasi, termasuk peningkatan kualitas pelatihan keterampilan dan koordinasi antara pemerintah dan perusahaan. Revisi kebijakan dan peningkatan sistem informasi sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Pembahasan

Implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi keberhasilannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Penemuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Wicaksana et al. (2020), yang menyatakan bahwa kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri merupakan tantangan besar dalam kebijakan ketenagakerjaan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, Grindle (2016) mengemukakan bahwa meskipun kebijakan ketenagakerjaan diimplementasikan dengan baik, ketidakcocokan antara keterampilan dan permintaan pasar kerja sering menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, praktik pencaloan dalam penempatan tenaga kerja juga ditemukan sebagai masalah yang memperburuk efektivitas kebijakan ini. Pencari kerja yang memilih menggunakan jasa calo untuk mendapatkan pekerjaan mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap prosedur resmi yang ada. Hal ini sesuai dengan temuan dalam studi oleh Sulaiman dan Aryanto (2019), yang menunjukkan bahwa adanya calo pekerjaan di daerah tertentu dapat mengurangi kredibilitas program penempatan tenaga kerja yang dikelola oleh pemerintah, serta memperburuk ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kerja. Keberadaan calo ini menciptakan ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam proses

penempatan tenaga kerja, yang menyebabkan banyak pencari kerja tergantung pada jalur informal meskipun itu berisiko.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta yang belum optimal juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, ditemukan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian oleh Sugianto (2020) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan lowongan pekerjaan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, karena informasi yang dibutuhkan pencari kerja tidak sampai kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penempatan tenaga kerja memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta.

Dari segi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun program ini berhasil mengurangi pengangguran, dampaknya terbatas pada kelompok pencari kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono (2016) mengenai dampak kebijakan ketenagakerjaan di daerah, yang menemukan bahwa pencari kerja yang memiliki keterampilan spesifik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk diserap dalam dunia kerja, dibandingkan mereka yang hanya memiliki keterampilan dasar. Penurunan angka pengangguran yang tercatat di Kabupaten Lebak tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena banyak pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau sesuai dengan kemampuan mereka.

Sebagai respons terhadap tantangan yang ditemukan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program penempatan tenaga

kerja di Kabupaten Lebak. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan yang lebih sesuai dengan permintaan pasar kerja. Dalam hal ini, kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga program pelatihan yang ada dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi pencari kerja. Rekomendasi ini didukung oleh temuan dalam studi oleh Wicaksana et al. (2020), yang menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja di pasar formal. Selain itu, rekomendasi untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan agar mereka melaporkan lowongan pekerjaan secara tepat waktu juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Sulaiman dan Aryanto (2019), yang menyarankan agar pemerintah daerah memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif berpartisipasi dalam program penempatan tenaga kerja.

Keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada peningkatan sistem informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur penempatan tenaga kerja yang resmi. Sosialisasi yang lebih gencar mengenai prosedur ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada calo yang seringkali merugikan mereka. Hal ini mendukung pendapat yang disampaikan oleh Grindle (1980) yang menekankan pentingnya peran administrasi publik dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak memiliki dampak positif terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tantangan yang ada harus segera diatasi agar kebijakan ini dapat lebih efektif. Diperlukan peningkatan kualitas pelatihan, penguatan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi untuk

mempercepat proses penempatan dan memastikan bahwa informasi lowongan pekerjaan tersedia secara transparan. Dengan upaya perbaikan tersebut, program penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak memiliki dampak positif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih menghadapi tantangan signifikan. Masalah utama yang ditemukan adalah ketidakcocokan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan, serta praktik pencaloan yang menghambat efektivitas kebijakan. Temuan ini memperkuat riset sebelumnya yang menunjukkan kesenjangan keterampilan sebagai penghambat utama dalam kebijakan ketenagakerjaan. Meskipun kebijakan ini sudah memberikan manfaat, perlu adanya perbaikan dalam sistem pelatihan keterampilan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan agar program penempatan tenaga kerja dapat lebih efektif dan memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri lokal, serta memperkuat koordinasi dengan sektor swasta untuk memastikan pelaporan lowongan pekerjaan yang tepat waktu dan transparan. Selain itu, perlu adanya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang prosedur penempatan tenaga kerja yang resmi untuk mengurangi ketergantungan pada praktik pencaloan. Pemanfaatan teknologi informasi juga penting untuk

mempermudah pencari kerja dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan. Pemerintah daerah sebaiknya juga mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan keterlibatan aktif mereka dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asna, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1).
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (2010). *Qualitative Research Methods: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson Education.
- Fatimah, S. (2020). *Teori Perencanaan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2016). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2017). Implementation and Public Policy. *Journal of Public Administration*, 31(2), 67-84.
- Langkai, J. E. (2020). *Kebijakan Publik*. Malang: CV Seribu Bintang.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI).
- Sulaiman, R., & Aryanto, I. (2019). Praktik Pencaharian dalam Penempatan Tenaga Kerja: Dampaknya terhadap Kualitas Kebijakan Ketenagakerjaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45-58.
- Sulastri, S., Sardjo, & Koeshariyaningsih, L. D. (2016). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugianto, Y. T. P. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3), 21-30.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Trianggono, B., Hartanto, & Masjkuri, S. U. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 21-30.
- Uddin, B. Sore, & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Wicaksana, H. H., Ghafur, W. J., & Wasi, I. (2020). *New Normal: Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kontemporer*. Serang: UNTIRTA PRESS.